



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



AKUNTANSI LINGKUNGAN DALAM *PITUTUR LUHUR KEJAWEN*

Ria Anindita, Hamidah

Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4 - 6, Surabaya 60115

Surel: riaanindita93@gmail.com

Volume 11
Nomor 2
Halaman 278-296
Malang, Agustus 2020
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

16 Juni 2020

Tanggal Revisi:

20 Agustus 2020

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2020

Kata kunci:

akuntansi lingkungan,
kerja sama,
norma,
pitutur



Abstrak: Akuntansi Lingkungan dalam *Pitutur Luhur* Kejawen. Penelitian ini bertujuan menginterpretasikan akuntansi lingkungan dengan menafsirkan pesan tersirat *pitutur luhur* kejawen. Metafora penelaahan digunakan sebagai metode untuk menangkap dan menjabarkan fenomena terkait akuntansi lingkungan. Penelitian ini menemukan beberapa tahapan kebijakan akuntansi lingkungan dari sikap etis dan norma kemanusiaan. Tahapan pertama adalah menyeimbangkan alam dan kepentingan perusahaan. Tahapan kedua adalah mendekatkan perusahaan dengan masyarakat. Tahapan ketiga adalah kerja sama antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam menerapkan akuntansi lingkungan. Tahapan ketiga adalah kunci utama keberhasilan penerapan akuntansi lingkungan.

Abstract: Environmental Accounting Based on *Kejawen's Advice*. This research aims to interpret environmental accounting by interpreting the implicit messages of *Kejawen's Advice*. A metaphorical analysis is used as a method to capture and describe the phenomenon of environmental accounting. This research found several stages of environmental accounting policies from ethical attitudes and human norms. The first stage is to balance nature and the interests of the company. The second stage is to get the company closer to the community. The third stage is the collaboration between companies, communities and the government. The third stage is the main key to the successful application of environmental accounting.

Mengutip ini sebagai: Anindita, R., & Hamidah. (2020). Akuntansi Lingkungan dalam *Pitutur Luhur* Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278-296. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.17>

Aktivitas industri pada dasarnya memiliki dampak pada kerusakan lingkungan. Faktor perubahan lingkungan, salah satunya yaitu faktor industri, disebabkan karena tingkat emisi karbon (berasal dari pembakaran fosil, pertambangan, dan limbah) meningkat (Mans-Kemp & Lugt, 2020; Zhang et al., 2018). Kegiatan produksi perusahaan merupakan kegiatan yang didukung sumber daya alam dari kegiatan produksi tersebut menghasilkan limbah yang akan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terus menerus membuat pemangku kepentingan mendorong perusahaan lebih

peduli dengan lingkungan. Kebutuhan baru bagi *stakeholder* dalam mempertimbangkan kepedulian lingkungan menjadi tujuan perusahaan ikut berubah. Tujuan perusahaan di masa kini tidak terpusat hanya pada keuntungan material yang diperoleh dari kegiatan industri. Tanggung jawab perusahaan pada lingkungan menjadi lebih mendalam bukan sebatas persoalan pengolahan limbah, melainkan dari semua kegiatan industri mulai dari awal pengambilan bahan mentah alam, proses produksi, sampai dengan pembuangan limbah. Seluruh proses tersebut diharapkan tidak merusak

lingkungan (Pratiwi, 2013; Rodriguez-Fernandez, 2016). Tujuan perusahaan tersebut perlu didukung dengan sistem akuntansi yang mampu menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Akuntansi dalam menghadapi tuntutan tersebut membuat gagasan berupa akuntansi lingkungan. Konsep akuntansi lingkungan yang dibahas merupakan kecakapan dalam menekan permasalahan lingkungan yang dijumpai perusahaan dengan maksud optimalisasi pengendalian lingkungan yang tepat guna. Efisiensi pengendalian lingkungan dengan mengadakan penilaian perkara lingkungan dari perspektif biaya dan manfaat ekonomi berguna untuk mendapatkan hasil pembiayaan dan harga yang lebih akurat terhadap produk pengendalian lingkungan yang dibutuhkan dalam memenuhi persoalan pelanggan yang menginginkan produk dan jasa lingkungan yang ramah lingkungan. Informasi yang disampaikan mengenai hasil kerja pelestarian lingkungan akan terpisah dengan laporan keuangan konvensional. Laporan lingkungan terdapat pada laporan keberlanjutan ataupun pada laporan tahunan (Henri et al., 2016; Kılıç & Kuzey, 2018; Senn & Giordano-Spring, 2020).

Indonesia memiliki luas wilayah yang besar maka mempengaruhi keberadaan multibudaya yang ditunjang dengan beranekaragam suku, agama dan ras. Budaya merupakan lambang kebiasaan masyarakat yang berwujud benda atau pemikiran untuk menggambarkan keadaan lingkungan dan pengalaman yang terjadi sehingga menghasilkan nilai budaya (Kamayanti & Ahmar, 2019; Salim, 2013; Zanten, 2012). Falsafah Jawa mengajarkan berbagai macam petuah hidup seperti interaksi orang tua dan anak, tata krama, etika, adil di mata hukum, serta interaksi sosial dalam bentuk saling membantu sesama membentuk toleransi dan demokrasi. Budaya kejawen menjunjung tinggi ajaran nilai kehidupan yang memiliki karakter kuat. Falsafah Jawa menjadi pedoman nilai-nilai kepribadian masyarakat yang pandai dan bijak tanpa bersinggungan dengan orang lain untuk mewujudkan toleransi. Falsafah Jawa mengandung makna pengajaran norma dan etika yang disampaikan para leluhur secara konten dan teks tersirat yang makna dan artinya belum banyak ditelaah secara mendalam (Firdausy, 2017; Zakub et al., 2018). Nilai budaya yang terkandung pada kebudayaan Jawa disebut

pitutur luhur. *Pitutur luhur*, adalah nasihat untuk menuju kebaikan yang diungkapkan secara lisan dengan bahasa simbol. *Pitutur luhur* menjadikan masyarakat Jawa memiliki pemikiran kritis karena mencakup banyak aspek. Nilai yang terkandung dalam *pitutur luhur* adalah ketuhanan, kemanusiaan, kerohanian, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, dan keduniawian. *Pitutur* ini menggunakan kata kiasan agar mudah diterima masyarakat dan apabila ada sindiran tidak menyakiti hati (Sumodiningrat & Wulandari, 2014). *Pitutur luhur* yang berawal dari nasihat berbentuk lisan dijadikan sebagai bentuk pembelajaran ilmiah yang dituangkan pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang membahas *pitutur luhur* yang dikaitkan dengan akuntansi dilakukan oleh Eltivia (2013), Pangesti (2017), Prasetyo (2019), dan Reraja (2019). Hal ini bukan sesuatu yang aneh karena bidang akuntansi merupakan ilmu sosial yang berasal dari keberadaan dan pemikiran individu pada suatu kelompok dengan struktur dan praktik sesuai lingkungan (Azmi et al., 2018). Oleh karena itu, ilmu akuntansi sangat sesuai jika berpatokan pada *pitutur luhur* sebagai dasar pemikiran dalam bidang profesi.

Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu mendalami penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan perusahaan dalam perspektif nilai sikap etis dan norma-norma pada *pitutur luhur*. Penelitian sebelumnya (yang telah diuraikan) lebih dominan pada praktik akuntansi eksternal, sedangkan pada penelitian ini membahas dari sisi akuntansi internal. Penelitian ini akan membahasnya dalam perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya, Etika bisnis mengacu pada arti dan makna sebuah perusahaan. Perusahaan dimaknai sebagai organisasi yang dioperasikan dengan tujuan insentif keuntungan. Selain itu, penelitian ini akan menjabarkan makna perusahaan bahwa tujuan yang dicapai tidak hanya demi keuntungan secara finansial melainkan ada tujuan lain yang harus dilakukan demi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dalam hal ini digambarkan sebagai manusia sehingga apabila memiliki etika dan tata krama yang baik, hubungan sosial akan berlangsung dengan baik di masyarakat selaras dengan tujuan *pitutur* Jawa.

Pada sisi lain penggunaan metafora pada penelitian akuntansi masih belum banyak dilakukan tetapi lebih dominan digunakan pada penelitian sastra. Penggunaan

metafora akan membantu menafsirkan pesan kata *pitutur luhur* yang tersirat menjadi mudah untuk dipahami. Pemahaman dan pembelajaran melalui ungkapan kata bertujuan untuk memperhatikan dan memandang makna kehidupan agar terwujud kesesuaian dan keserasian dengan Tuhan, sesamanya, masyarakat, dan lingkungan alam (Firdausy, 2017; Kamayanti & Ahmar, 2019). *Pitutur luhur* selaras dengan konsep akuntansi lingkungan membantu perusahaan dalam mengelola perbaikan lingkungan yang disampaikan pada *stakeholders* untuk menunjukkan keselarasan antara masyarakat dan lingkungan alam.

Berdasarkan argumentasi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan dan menafsirkan *pitutur luhur* dengan definisi dan kesesuaian konsep akuntansi lingkungan secara teori dan peraturan. Pemaknaan konsep ini diharapkan setiap perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan maksimal pada aktivitas bisnis melainkan memunculkan sikap etis kepedulian kelestarian lingkungan hidup. Penafsiran definisi akuntansi lingkungan berdasarkan perspektif *pitutur luhur* juga akan membantu setiap perusahaan memenuhi kewajiban pertanggungjawaban berdasarkan unsur kemanusiaan. Selain itu, kontribusi penelitian bagi dunia akademisi adalah menghasilkan wawasan baru pada penelitian karakter manusia mengenai kepedulian sebagai makhluk sosial kepada kelestarian sumber daya alam sesuai ajaran *pitutur luhur*. Kontribusi praktis pada penelitian ini adalah dengan memaknai konsep ajaran *pitutur luhur* terhadap implementasi akuntansi lingkungan agar aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan mempunyai nilai keselarasan antara kesinambungan hidup perusahaan dan kedekatan sosial pada masyarakat. Hal tersebut juga bermanfaat dalam meningkatkan nilai perusahaan.

METODE

Analisis metafora memungkinkan para peneliti untuk mengerti dan melaporkan fenomena sosial dengan cara yang menarik. Analisis metafora berguna untuk mengungkap makna yang tersembunyi dan menyelidiki asumsi-asumsi melalui penelusuran pendukung untuk diberikan kepada kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan pemahaman. Penggunaan metafora memungkinkan para peneliti untuk

memiliki pandangan luas. Peneliti dapat menyelidiki asumsi dan norma untuk merefleksikan secara kritis mengenai pengalaman suatu hal. Pendekatan analisis metafora juga bekerja dengan populasi yang tidak dapat mengartikulasikan pengalaman mereka dengan jelas (Marriott & McGuigan, 2018; Rutherford, 2020).

Pemahaman teks yang diharapkan adalah wawasan makna yang mendalam di dalam teks yang dijelaskan dengan bahasa umum agar makna tersebut menjadi tampak. Proses menginterpretasikan teks terjadi karena adanya penempatan kembali penjelasan dan interpretasi dengan konsep umum. Konsep tersebut harus menyatukan antara penjelasan dan pemahaman pada saat pembacaan teks untuk menghasilkan makna yang saling berhubungan.

Analisis penelitian ini mengikuti teori metafora konseptual yang dikemukakan oleh Hummel & Hörisch (2020). Penemuan fakta pendukung interpretasi dilakukan dengan cara mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan antara teks *pitutur luhur* pada kegiatan akuntansi lingkungan. Kondisi pemahaman secara umum hasil dari pemahaman akuntansi lingkungan dengan menghubungkan antara keberakhiran dan universalitas, dan antara teori dan praktik (Beattie, 2014; Coulson et al., 2015).

Konsep metafora dalam konteks penilaian, melibatkan proses penalaran secara akal pikiran. Hal ini tercermin dalam kegiatan individu yang secara tidak langsung membangun makna dan ide melalui bahasa yang sangat bergantung pada konsep yang berasal dari kehidupan nyata. Metode metafora berbasis telaah menyajikan cara pengalaman dan realitas sesorang dengan pengandaian ke dalam hal yang dekat secara budaya dan sosiologis. Metafora sebagai alat yang tepat untuk penggambaran realitas akuntansi lingkungan perusahaan untuk menunjukkan realitas dari pengalaman mereka dalam aktivitas bisnis dijabarkan secara lebih mudah untuk dicerna dan dipelajari oleh pihak yang tidak memiliki pengalaman secara langsung. Metode metafora adalah alat yang cukup ampuh untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai akuntansi lingkungan dengan memahami persepsi perusahaan dan pemangku *stakeholders* lainnya (Kusdewanti et al., 2014; Lynott & Coventry, 2014).

Ajaran nilai kebudayaan Jawa identik menggunakan simbolis semiotika. Nilai

identitas budaya Jawa merupakan penjelasan mengenai sesuatu yang disampaikan melalui metafora. Arti yang terkandung pada *pitutur luhur* tersirat untuk memahami lebih dalam perlu dideskripsikan kedalam bahasa yang mudah dipahami. Bahasa mempresentasikan pemahaman manusia menjadi kumpulan wawasan pada suatu kelompok terhadap kehidupan dan membawa suatu keselarasan berkomunikasi. Penerjemahan dari simbolis menuju bahasa untuk memahami makna *pitutur luhur* berasaskan asal usul terbentuknya *pitutur luhur*, tidak berdasarkan pemikiran objektif. Metafora dalam *pitutur luhur* membawa pesan dan nilai pada kehidupan. Penerjemahan menggunakan bahasa umum mempunyai fungsi rasional yang bersangkutan dengan kebudayaan. Persepsi dalam konteks artikel ini menjelaskan karakter dan nilai yang terkandung dalam *pitutur luhur* untuk menyukseskan akuntansi lingkungan.

Realitas akuntansi lingkungan dan *pitutur luhur* diperoleh melalui studi literatur yang membahas pengalaman umum perusahaan dalam menjalankan akuntansi lingkungan dan fungsi nyata *pitutur luhur* dalam kehidupan di masa sekarang. Studi literatur memberikan asumsi-asumsi teori pendukung untuk menjelaskan nilai mana saja yang ada di *pitutur luhur* yang dapat memperjelas keberadaan akuntansi lingkungan. Penggunaan studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu berguna untuk memudahkan memetakan nilai-nilai yang terkandung tentang *pitutur luhur* di kehidupan masyarakat Indonesia. Proses analisis selanjutnya menggunakan metafora untuk menjelaskan bahasa tersirat pada *pitutur luhur* dengan realitas pengalaman akuntansi lingkungan sesuai nilai yang terkandung.

Penelitian ini digunakan untuk memahami *pitutur luhur* yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan. Kata lingkungan dalam *pitutur luhur* ditunjukkan untuk manusia sebagai makhluk sosial. Manusia perlu menjaga keseimbangan antara alam dan bumi agar kehidupan manusia menjadi nyaman dan dijauhkan dari amukan alam. Peran metafora pada pembahasan selanjutnya adalah menyampaikan pemahaman akuntansi lingkungan dalam *pitutur luhur* yang berhubungan dengan kepedulian pada pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab moral perusahaan. Penelitian ini tersusun untuk menemukan pemanfaatan dan keuntungan yang berasaskan pada pendekatan

pada *pitutur luhur* perlu mendapatkan pemahaman dalam karya budaya Jawa yang bersumber pada teks yang memiliki kosakata, kalimat, dan wacana pada jenis karya yang memiliki makna simbol-simbol, bahasa yang khusus perlu diamati secara mendalam (Musman, 2017; Sumodiningrat & Wulandari, 2014).

Tahapan pertama akan membahas metafora teks simbolis *ibu bumi, bapak aksa* dengan pengertian akuntansi lingkungan. Fakta pendukung didapat dari analisis pengertian dan aturan yang berlaku mengenai akuntansi lingkungan. Metafora teks simbolis *pitutur luhur ibu bumi, bapak aksa* diinterpretasikan pada tingkat kepentingan akuntansi lingkungan secara nilai keduniaan yang diberlakukan oleh penafsir. Menggali konsep-konsep yang saling berkaitan dan aturan logis harus dipenuhi dalam pelestarian lingkungan.

Tahapan kedua akan membahas metafora teks simbolis *aja nggugu karepe dhewe* dikaitkan dengan akuntansi lingkungan sebagai nilai hormat dan santun. Fakta pendukung didapat dari eksistensi, kesesuaian, dan pemahaman perusahaan mengenai akuntansi lingkungan. Metafora teks simbolis *pitutur luhur aja nggugu karepe dhewe* diinterpretasikan pada realita konsep akuntansi lingkungan yang sedang dilakukan perusahaan saat ini.

Tahapan ketiga akan membahas metafora teks simbolis *rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* dikaitkan dengan akuntansi lingkungan secara nilai kebangsaan. Fakta pendukung didapat dari peran perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menjalankan akuntansi lingkungan. Metafora teks simbolis *rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* diinterpretasikan pada kerjasama dan keselarasan tugas masing-masing antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mewujudkan akuntansi lingkungan sesuai awal tujuan terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggambaran fenomena yang terjadi pada akuntansi lingkungan dan *pitutur luhur* dilakukan dengan mengumpulkan studi literatur yang berkaitan pada dua pembahasan tersebut. Data yang diamati merupakan data literatur dimaksudkan menjadi gambaran yang utuh dan nyata sehingga dapat dijadikan acuan studi literatur. Rekap data yang dijadikan acuan analisis terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekap Data pada Studi Literatur

Penulis	Topik
Bernardi & Stark (2018)	Akuntansi Lingkungan
D'Amico et al. (2016)	Akuntansi Lingkungan
Deegan (2017)	Akuntansi Lingkungan
Mata et al. (2018)	Akuntansi Lingkungan
Qian et al. (2018)	Akuntansi Lingkungan
Senn & Giordano-Spring (2020)	Akuntansi Lingkungan
Sopacua (2017)	Akuntansi Lingkungan
Musman (2017)	<i>Pitutur Luhur</i>
Sumodiningrat & Wulandari (2014)	<i>Pitutur Luhur</i>
Tartono (2009)	<i>Pitutur Luhur</i>

Penelitian terkait akuntansi lingkungan yang terbesar adalah membahas kritik akuntansi tradisional dalam ketidaksesuaian untuk memajukan masalah sosial dan lingkungan. Beberapa penelitian tentang hal ini menyimpulkan bahwa praktik akuntansi keuangan tradisional jauh dari tujuan dan secara efektif berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan hasil sosial yang buruk. Jurnal akuntansi mencatat hal tersebut menjadi fokus penelitian yang paling menarik perhatian para peneliti akuntansi lingkungan. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan analisis isi laporan perusahaan dan melalui beberapa teori, mencoba menjelaskan perubahan dalam fokus pelaporan dengan mengaitkan perubahan dengan peristiwa eksternal tertentu seperti krisis sosial dan lingkungan tertentu atau perubahan dalam jenis atau media tertentu. Penelitian lebih dominan menggunakan studi analisis perusahaan di sektor industri lingkungan yang rentan dengan pencemaran lingkungan seperti pertambangan, manufaktur, dan perkebunan. Faktor yang mempengaruhi kinerja dan praktik pelaporan lingkungan berasal dari dua sisi yang saling terkait. Faktor internal tercermin sistem manajemen lingkungan, kebijakan pemimpin, dan tata kelola perusahaan. Sebaliknya faktor eksternal pada tekanan pemangku kepentingan, kegiatan audit, dan proporsi kepemilikan saham. Perusahaan dengan konsisten melakukan perbaikan kinerja lingkungan memiliki keuntungan yang baik bagi perusahaan seperti reputasi lingkungan organisasi itu sendiri, kepuasan pemangku kepentingan, biaya lingkungan, dan nilai saham. Penelitian tentang dampak

pelaporan lingkungan pada kinerja keuangan cenderung menghasilkan temuan yang tidak konsisten (D'Amico et al., 2016; Deegan, 2017; Mata et al., 2018)

Akuntansi lingkungan adalah cara untuk menentukan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya yang diperhatikan akuntansi lingkungan merupakan biaya menyelamatkan kualitas lingkungan. Kesuksesan perusahaan pada bidang sosial dan lingkungan dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Komitmen perusahaan yang tinggi untuk menjalankan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan diukur menggunakan parameter kinerja CSR.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia selalu dijadikan sebagai kewajiban. Gejolak penolakan dilakukan beberapa perkumpulan pengusaha di Indonesia. CSR sebaiknya dalam bentuk sukarela oleh sebuah korporasi untuk masyarakat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Penetapan peraturan yang menyatakan pemberlakuan CSR secara wajib dianggap sebagai kesalahan besar karena mengkaji penerapan CSR di negara-negara lain CSR hanya diwajibkan pada perusahaan milik negara tidak kepada semua perusahaan. Beberapa pengusaha menyatakan pemerintah yang membuat peraturan tersebut tidak mengkaji pada praktik di lapangan sehingga tidak paham, dan menjadikan CSR sebagai beban pajak baru. Kegiatan tanggung jawab perusahaan jika diwajibkan akan menimbulkan ketidaksesuaian aktivitas CSR karena berhubungan dengan bisnis perusahaannya. Keberadaan perusahaan di masa mendatang selain mengoptimalkan keberadaan *shareholders* perlu memikirkan kepentingan *stakeholders*.

Stakeholders memiliki pengaruh kuat dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan memaknai CSR sudah harus berubah bukan lagi sebagai beban tetapi sebagai investasi masa depan perusahaan yang berkelanjutan. Persaingan global menuntut perusahaan perlu Sertifikasi atau ISO pengelolaan lingkungan. *Sustainability Reporting Awards* (SRA) dilaksanakan sebagai langkah penghormatan atas keberhasilan dan kepedulian perusahaan-perusahaan yang melakukan pelaporan keberlanjutan ataupun pelaporan kegiatan CSR. Pelaporan tersebut dibagikan dalam situs pribadi perusahaan sebagai sarana untuk penyebaran informasi kegiatan bisnis lebih mudah dan cepat (Ahmadi & Bouri, 2017; Sopacua, 2017).

Penerapan akuntansi secara teori akan sangat berbeda dengan praktiknya. Penggambaran komitmen perusahaan dalam pelestarian lingkungan menggunakan pelaporan keberlanjutan terdapat dalam penelitian. Perusahaan diwajibkan pemerintah sebelum dilakukan pemulihan lahan setelah penambangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai syarat operasional (Velte & Stawinoga, 2017). Selain itu, antara para pemangku kepentingan diwajibkan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam kegiatan produktif, tidak terjadi keresahan sosial yang akan mengganggu jalannya produksi, dan pemrosesan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mencapai optimal level untuk CEO (Bernardi & Stark, 2018; Latan et al., 2018).

Kunci utama keberhasilan komitmen perusahaan yaitu memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah, karyawan, dan masyarakat sekitar. Aspek pengembangan masyarakat seharusnya diimplementasikan dengan tekad dan peran oleh keseluruhan pihak yang berkaitan secara bersama-sama. Pemberian edukasi mengenai program kelestarian lingkungan pada pemangku kepentingan menjadi peran pemimpin utama sebagai penghubung eksternal perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan evaluasi berkala untuk melihat keberlanjutan program. Pemahaman konsep akuntabilitas pemangku kepentingan yang dibangun oleh perusahaan sebagai hubungan kerja tidak berfokus pada pemangku kepentingan sebagai objek, tetapi dengan mengarah ke bentuk kolaborasi antara keduanya. Hubungan kerja diwujudkan dalam interaksi antara para pemangku kepentingan ini pada dasarnya merupakan

bentuk pengembangan masyarakat sebagai hasil tanggung jawab sosial perusahaan.

Pitutur luhur membahas suatu makna yang dijelaskan melalui tulisan dalam bentuk teks dan kondisi. Teks yang disampaikan memiliki beranekaragam bahasa sekaligus ekspresi untuk menyampaikan komunikasi baik secara lisan maupun visual. Kondisi yang dimaksud adalah situasi pendukung yang mampu membantu menjelaskan sebuah teks dalam penggunaan bahasa. *Pitutur luhur* terjadi pada saat situasi dan kondisi tertentu. Konteks akan menunjukkan perbedaan penyampaian *pitutur luhur* bergantung kepada siapa yang memberi dan mendapat *pitutur*. Perbedaan penyampaian secara gender, usia, tingkat pendidikan, kasta lingkungan, suku, agama, wilayah, dan waktu. Ungkapan-ungkapan tradisional dalam *pitutur luhur* budaya Jawa terinspirasi dari masa kehidupan masyarakat agraris sehingga peribahasa dibahas menggunakan simbolis dalam bentuk binatang, tanaman, dan fungsi tubuh manusia. *Pitutur luhur* mempunyai makna tersirat mengenai nilai-nilai karakter kepada Tuhan secara kerohanian serta nilai karakter antarmanusia, negara, keluarga, dan keduniawian. Nilai-nilai karakter terbentuk dari kebiasaan kehidupan orang Jawa dari waktu ke waktu menjadi pedoman nilai ajar karakter di Indonesia sejak nenek moyang kita. *Pitutur luhur* dijadikan pembahasan untuk kepentingan ilmu budi pekerti. Pencetus Ki Hadjar Dewantara dalam pembahasan ilmu tersebut terinspirasi dari kehidupan sehari-hari di pulau Jawa. *Pitutur luhur* menjadi warisan dari keturunan Jawa.

Pitutur luhur bersifat dinamis dan umum, dapat dijadikan tuntunan dalam berbagai permasalahan kehidupan, dan diterapkan di semua kondisi. *Pitutur luhur* menjadi latar belakang kebutuhan manusia dalam mencapai kemuliaan hidup di dunia. *Pitutur luhur* juga dapat berperan memberikan solusi terbaik dari masalah tertentu. *Pitutur luhur* kemudian sebagai instruksi moral dalam menghadapi situasi tertentu. Penelitian yang menafsirkan ajaran *pitutur luhur* berawal dari pendidikan karakter pada usia dini. *Pitutur luhur* Jawa tidak dimaksudkan untuk dihafal saja, tetapi tujuan utamanya adalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pernyataan ini diharapkan seseorang bisa memiliki perilaku yang baik dan menonjol dalam mencapai kehidupan. *Pitutur luhur* juga menja-

di landasan dalam mengamalkan nilai-nilai dalam ajaran Islam ditunjukkan pada prinsip-prinsip tersebut yang berada di bagian dalam manusia.

Pemaparan akan kelangsungan akuntansi lingkungan dan kegunaan dari *pitutur luhur* melalui studi literatur menjadikan penulis mengaitkan kedua hal tersebut sebagai sebuah pemikiran baru. Pemikiran mengenai keberhasilan akuntansi lingkungan tidak akan tercapai jika moral dan hati nurani tidak dijadikan hal utama meski aturan sudah ditetapkan.

Metafora Ibu bumi, Bapa Aksa sebagai akuntansi lingkungan dalam nilai keduniawian, Teori ekonomi klasik yang diciptakan Smith (1776) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan maju apabila jumlah penduduk yang berproduktif dalam pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Teori ini menjadikan perusahaan melakukan pemanfaatan kekayaan alam dengan sesuka hati demi kepentingan pribadi untuk pertumbuhan ekonomi. Perusahaan berdalih bahwa teori ekonomi dengan pendekatan konsep maksimalisasi laba menjelaskan tujuan kegiatan bisnis adalah memaksimalkan laba dengan meminimalisasi pengeluaran biaya. Perusahaan cenderung menciptakan strategi dan kebijakan pembanguan lebih mengutamakan pencapaian laba yang akan dibagikan kepada para pemangku kepentingan dengan mengesampingkan kerusakan dalam eksploitasi lingkungan pada saat kegiatan industri. Pengelolaan lingkungan tidak menjadi prioritas pada pembiayaan perusahaan (Chan et al., 2014; Rodriguez-Fernandez, 2016).

Sumber daya alam tidak memiliki hak milik yang jelas dan barang bebas sehingga dalam penggunaan tidak memiliki harga pada saat digunakan. Ketidakadaan hak milik pada sumber daya alam menjadikan eksternalitas. Eksternalitas terjadi apabila kegiatan perekonomian memiliki pengaruh secara tidak langsung pada kegiatan perekonomian lain. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menimbulkan eksternalitas negatif seperti penguasaan lahan dalam pengambilan bahan mentah alam sebagai bahan produksi, polusi yang ditimbulkan dalam penggunaan energi dalam proses produksi dan limbah perusahaan. Eksternalitas negatif terjadi pada saat aktivitas suatu individu ataupun kelompok mem-

berikan dampak yang berbahaya bagi orang lain. Selain itu, eksternalitas negatif timbul apabila jumlah biaya sosial lebih besar daripada jumlah biaya individu, maka tingkat kepentingan *output* individu menjadi besar daripada kepentingan sosial (Böhringer et al., 2016; Siskawati & Susilawati, 2017).

Eksternalitas memberikan perbedaan mengenai manfaat sosial dengan manfaat individu. Perbedaan terjadi pada saat memberikan penyaluran hasil sumber daya yang tidak tepat guna. Kelompok penyebab eksternalitas tidak ada niatan dalam menjalankan tanggung jawab atas dampak kegiatan bisnis kepada kelompok lain. Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan industri tersebut perusahaan tidak menanggung biaya karena pemanfaatan sumber daya alam bukan hak milik perusahaan melainkan barang bebas. Kerusakan lingkungan merupakan bagian dari eksternalitas daerah karena sumber daya alam merupakan barang publik yang memiliki ciri dikonsumsi umum atau gabungan sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu bersaing dan barang publik tidak memiliki eksklusif karena tersedia untuk semua makhluk hidup (Siskawati & Susilawati, 2017; Zhang & Zhang, 2017).

Pada sisi lainnya, eksternalitas merupakan salah satu faktor kegagalan pasar. Eksternalitas membuat pasar menjadi inefisien. Pada kegagalan pasar terjadi perbedaan *marginal benefit* dan *marginal cost*. Kegagalan pasar menjadikan terlalu banyak barang dan jasa yang tersedia pada hal tertentu saja, sedangkan untuk bidang lain berkurang dalam menghasilkan barang dan jasa. Terbentuknya keseimbangan pasar memerlukan kondisi setara antara permintaan dengan penawaran yaitu kerelaan dalam membayar seimbang dengan permintaan tambahan biaya terhadap barang yang direalisasikan dengan penawaran. Eksternalitas negatif terjadi apabila perbedaan tipis antara keuntungan dan biaya. Kegagalan pasar untuk menjaga perilaku pelaku pasar semena-mena terhadap lingkungan demi menghasilkan laba yang banyak menimbulkan krisis lingkungan dan krisis sosial. Krisis tersebut apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan mendalam akan merugikan perusahaan dan negara itu sendiri dalam jangka panjang karena modal sumber daya alam sebagai bahan baku produksi lama kelamaan akan habis dan ketidak keseim-

bangun alam dengan manusia akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja (Awalin, 2017; Solovida & Latan, 2017).

Apabila eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan sesuka hati demi meraih maksimum laba perusahaan dalam jangka panjang tidak ditangani dengan baik kelak dapat menimbulkan petaka bagi perusahaan itu sendiri. Ajaran tersebut tersirat pada *Ibu bumi, bapa aksa. Pitutur luhur* tersebut memiliki arti mengajak kita untuk menjadi manusia yang saling mengasihi, mengayomi, serta memperdulikan bumi dan langit layaknya kita bersikap kepada orang tua. Jangan sampai kita menyakiti salah satu orang tua kita karena salah satunya juga ikut tersakiti. Manusia, apabila mengacau bumi, maka langit tidak akan ambil diam. Perusakan lingkungan oleh aktivitas industri seperti penggunaan bahan bakar berlebih saat proses industri akan menimbulkan polusi, akibatnya langit menunjukkan kemarahannya dengan fenomena seperti pemanasan global.

Filosofi ibu dianggap menjadi bumi karena bumi merupakan tempat manusia lahir mengawali hidup, dan mengakhiri hidup di bumi. Bumi merupakan tempat tinggal dan bernaung seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Ibu sebagai simbol dalam menyumbangkan kebaikan berlimpah pada kegiatan pangan. Langit adalah sebagai simbol bapak yang mencurahkan kebahagiaan melalui hujan. Filosofi bapak sebagai langit atau aksa adalah manusia apabila melalui hidup tanpa makan masih dapat menjalani hidup ke depan, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa udara dilangit yang dinamakan *bapak aksa*. Tuhan selalu mengingatkan bahwa setiap doa orang tua begitu penting. Keseimbangan bumi, langit, dan manusia menggambarkan begitu penting seperti doa orang tua. Pembelajaran dari *pitutur luhur* tersebut menjadikan gambaran bahwa kerusakan lingkungan perlu ada kepedulian tindakan pencegahan perusahaan agar kelangsungan hidup perusahaan, masyarakat, dan bumi menjadi seimbang (Musman, 2017; Sumodiningrat & Wulandari, 2014).

Filosofi *ibu bumi, bapak aksa* merupakan *pitutur luhur* yang memiliki nilai-nilai keduniawian. Nilai-nilai keduniawian yaitu bagaimana kita berpikir mengenai kebahagiaan dunia sehingga melakukan tindakan untuk memenuhi kebahagiaan tersebut. Hannah Arendt mengatakan apabila berpandangan mengenai dunia berfokus kepada

peristiwa dalam dunia karena setiap peristiwa yang ada di dunia memiliki nilai yang dapat dipelajari oleh pikiran manusia. Konteks pemahaman Arendt tentang dunia adalah tingkat eksistensi manusia karena dunia untuk menjadikan pendapat manusia yang lain menjadi signifikan dan efektif sehingga terbentuk hubungan saling mengisi keberadaan dan kenyataan dalam kehidupan manusia. Makna dunia bagi manusia bukanlah alam atau bumi, tetapi keseluruhan barang-barang yang diproduksi secara terorganisasi untuk bisa meneguhkan hati dari kebiasaan hidup yang boros. Maka, dengan menggunakan akal dan tenaga manusia menghasilkan karya manusia untuk mengatur barang-barang hasil karya tersebut. Nilai-nilai keduniawian merupakan kondisi yang berhubungan dengan aktivitas karya manusia sehingga makna akan keduniawian merupakan ciptaan oleh manusia sendiri (Dillard & Brown, 2015; Musman, 2017).

Dunia eksistensi merujuk pada kemampuan manusia dalam membuat dan menciptakan sebuah dunia. Nilai-nilai keduniawian merupakan cara untuk menjadikan keberadaan manusia penting di dalam lingkungan sosial dirancang oleh pola pikir yang dibuat sendiri. Hannah Arendt menyimpulkan ada dua makna tanggung jawab manusia terhadap dunia yaitu kepedulian manusia kepada dunia dan diri sendiri (Reraja, 2019; Siskawati & Susilawati, 2017). Kepedulian kepada dunia memiliki arti sebagai tanggung jawab menerima apa yang diberikan pada kita dalam dunia. Sebagai tanggung jawab atas kepedulian manusia pada dunia maka manusia akan berusaha memahami atau mengetahui makna dunia bagi manusia sehingga berjuang untuk melakukan sesuatu bagi dunia. Tanggung jawab dalam mensyukuri apa yang telah diberikan oleh dunia seperti kita lahir dalam sebuah keadaan di mana manusia dan dunia memiliki banyak manfaat. Hidup perlu dipenuhi dengan rasa syukur karena kita diberi kehidupan sudah merupakan pemberian yang besar kepada kita (Hazelton, 2014; Pangesti, 2017).

Tanggung jawab terhadap dunia menunjuk pada kepedulian terhadap dunia jika dikaitkan dengan akuntansi lingkungan maka kita harus memahami keadaan alam yang lama-kelamaan akan mengalami penurunan fungsi apabila kita sebagai manusia atau perusahaan selalu mengeksploitasi demi meraih laba maksimum. Berusa-

ha dalam mengerti dunia dan menunjukkan perhatian kita dengan membuat gerakan penyelamatan atas kerusakan alam yang salah satunya ialah penggunaan akuntansi lingkungan karena dunia adalah rumah kita sendiri sehingga perlu membuat dunia mendatangkan ladang kemakmuran bagi semua. Tanggungjawab atas semua yang diberikan pada dunia untuk kita sendiri. Contoh dalam penelitian ini adalah kita diberi kekayaan alam yang begitu melimpah sehingga memudahkan untuk menjalani kehidupan. Dunia menasihati kita perlu menyangi diri sendiri apabila kekayaan alam terus dipergunakan tanpa ada timbal balik perawatan dan pelestarian maka yang akan merugi adalah diri kita.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri menjadi perhatian dunia. Protokol Kyoto pada saat Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 1999 memiliki tujuan mengurangi emisi karbon di dunia dengan kerja sama antaranggota PBB. Ernst & Young (EY) Indonesia menghasilkan pernyataan bahwa investor memerlukan informasi lebih mengenai informasi non-keuangan dari perusahaan. Selama ini informasi yang dihasilkan pada proses akuntansi sebatas proses akuntansi keuangan. Informasi mengenai perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan alam dampak-dampak eksternalitas belum diinformasikan dalam proses akuntansi. Desakan para investor untuk menginformasikan aktivitas non keuangan menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan mencakup kepedulian lingkungan dan masyarakat untuk mendapat kepercayaan investor.

Akuntansi konvensional memiliki tujuan untuk memberi pertanggungjawaban informasi atas aktivitas kepada seluruh pemangku kepentingan yang pada umumnya menjadikan laba dan tingkat kredibilitas perusahaan sebagai tujuan. Perubahan tujuan diinginkan pemangku kepentingan karena tekanan lingkungan yang berubah. Implikasinya, tujuan akuntansi mengikuti perubahan tersebut. Perubahan lingkungan yang semakin rusak akibat aktivitas perusahaan menjadi alasan bagi perusahaan untuk juga memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan agar kerusakan tidak menjadi fatal. Perhatian perusahaan untuk mewujudkan gerakan peduli lingkungan adalah dengan mencetuskan akuntansi lingkungan (Massaro et al., 2018; Velte & Stawinoga, 2017). Penggunaan akuntansi lingkungan

untuk memberikan informasi kegiatan konservasi lingkungan mengenai sumber modal dan aset mempengaruhi kegiatan ekonomi. Fungsi lain informasi berguna untuk mempengaruhi pengambilan keputusan *stakeholders*. Penggunaan akuntansi lingkungan menjadikan informasi yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi lingkungan sejalan dengan *pitutur luhur ibu bumi, bapak aksa*. Selain bertujuan memperoleh laba, perusahaan perlu ada kepedulian menyelamatkan lingkungan untuk menyeimbangkan hubungan antara keberlangsungan perusahaan dengan masyarakat umum. Akuntansi lingkungan juga berperan sebagai proses pengelompokan, menghimpun, serta mengulas informasi yang berhubungan dengan biaya dan kinerja yang memberikan manfaat bagi aktivitas lingkungan menggunakan sistem akuntansi lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam perbaikan lingkungan. Pengelolaan biaya untuk mewujudkan akuntansi lingkungan menggunakan akuntansi manajemen lingkungan. Pengelompokan dibagi menjadi dua yaitu biaya yang berdampak secara langsung terhadap perusahaan dan biaya perusahaan untuk kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan.

Akuntansi lingkungan menjadikan perusahaan memiliki sistem informasi lingkungan yang teroganisasi dan terukur sehingga memberikan informasi yang akurat, andal, dan mudah dipahami *stakeholders* (Massaro et al., 2018). Tercapainya akuntansi lingkungan dapat diukur dengan kinerja lingkungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja keuangan sehingga perusahaan berlomba-lomba dalam menerbitkan pelaporan lingkungan meski bersifat sukarela (Chan et al., 2014; Latan et al., 2018; Winkler et al., 2020). Pencapaian kinerja lingkungan dapat diukur menggunakan GRI Indeks yang diterbitkan oleh pihak independen yaitu *global reporting initiative*. Pada sisi lainnya, peningkatan informasi yang diungkapkan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, jenis industri, tingkat utang, dan kebijakan manajemen (Chandok & Singh, 2017; D'Amico et al., 2016; Nor et al., 2016). Hal ini terjadi karena penggunaan akuntansi lingkungan masih belum banyak perusahaan yang melakukan. Biaya kepatuhan lingkungan sangat tinggi sehingga perusahaan enggan untuk melaporkan

aktivitas lingkungan (Burritt & Schaltegger, 2014; Hashemi et al., 2015; Henri et al., 2016; Kiliç & Kuzey, 2018).

Metafora aja nggugu karepe dhewe sebagai akuntansi lingkungan dalam nilai hormat dan santun. Akuntansi konvensional mempunyai makna yang berhubungan dengan keuangan sehingga pengukuran dinilai cukup akurat berbeda dengan akuntansi lingkungan. Pengukuran akuntansi lingkungan terjadi kesulitan dalam pengukuran nilai biaya dan kerugian yang terjadi pada masyarakat sekitar dan lingkungan ekologis yang ditimbulkan kerusakan sumber daya alamnya. Pengungkapan lingkungan masih dirasa kurang komprehensif karena kekhawatiran adanya biaya yang dikeluarkan dijadikan beban yang semestinya pada akuntansi lingkungan tidak mengeluarkan biaya tersebut. Pengungkapan biaya eksternal terhadap kerusakan sumber daya alam akan berguna untuk pengambilan keputusan *stakeholders*, tetapi pada kenyataan reaksi pasar tidak jauh berbeda memberikan respon terhadap perusahaan yang tidak melaporkan aktivitas perusahaan. Peran pemerintah diperlukan untuk hal ini agar pelaksanaan akuntabilitas lingkungan akan berhasil jika didukung oleh peraturan (Chandok & Singh, 2017; Henri et al., 2016).

Burhany & Nurniah (2018) dan King (2017) bahwa informasi yang dilaporkan pada pelaporan akuntansi lingkungan bersifat subjektif karena perusahaan hanya mengabarkan keadaan baik demi menaikkan kredibilitas perusahaan, sedangkan kabar buruk jarang dilaporkan. Penerapan akuntansi lingkungan kurang diminati perusahaan menengah dan kecil karena pelaporan akuntansi lingkungan dirasa mengurangi pendapatan dan menambah biaya. Pendapat tersebut dianggap memberatkan perusahaan karena memangkas keuntungan perusahaan. Anggapan tersebut dapat menghambat proses perbaikan kerusakan alam yang ditimbulkan perusahaan. Mengenai hal tersebut nenek moyang kita selalu mengajarkan bahwa menjadi manusia aja *nggugu karepe dhewe* yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki makna jangan berbuat sekehendak sendiri.

Aja nggugu karepe dhewe mengajarkan mengenai tingkah laku kita dalam membimbing diri supaya jangan melakukan hal semena-mena terhadap orang lain. Filosofi ini mengarahkan kita untuk bisa mengelola dan mengendalikan nafsu sehingga kita

tidak dikendalikan terhadap nafsu. Belajar untuk tidak semena-mena terhadap manusia secara tidak langsung untuk menghargai kelangsungan alam. Orang hidup harus toleransi serta menghargai cara berpikir dan pandangan orang lain. Setiap orang tidak disarankan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Ada kebenaran menurut Tuhan dan orang lain. Kebenaran versi diri sendiri biasanya yang menyenangkan nafsu dan sering berbenturan dengan kebenaran menurut pihak lain. Kerusakan alam juga merepresentasikan lebih mementingkan nafsu demi kesenangan pribadi memiliki pengaruh pada orang lain (Musman, 2017; Sumodiningrat & Wulandari, 2014).

Pitutur luhur aja nggugu karepe dhewe merupakan pilar karakter hormat dan santun. Susilo & Syato (2016), Tartono (2009), dan Widodo & Saddhono (2012) berargumentasi bahwa kesopanan adalah kesopanan lembut dan sikap sopan yang dikenal pertama kali di Eropa dari perilaku bangsawan dalam buku-buku santun. Acuan dalam sopan ialah Cortegiano yang mengajarkan etika dasar sopan santun tata cara percakapan serta keterampilan intelektual. Hormat merupakan sikap menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Rasa hormat dalam menghargai orang lain dan santun adalah tata bahasa yang halus dan baik. Hormat dan santun sikap yang menunjukkan dalam penghormatan terhadap Tuhan, mencintai diri sendiri serta peduli kepada lingkungan karena memahami asal usul sebagai manusia dan masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak merasa yang paling patut untuk dihargai.

Manusia di dunia ini bukanlah makhluk hidup satu-satunya yang merasakan kenikmatan bumi. Makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah hewan dan tumbuhan juga memiliki hak yang sama dalam menikmati kekayaan bumi. Maka, sikap sopan santun tidak hanya berlaku antarmanusia. Kita perlu menghargai juga alam. Maka, penggunaan akuntansi lingkungan merupakan bentuk sopan dan santun antara sesama manusia agar hidup tidak terganggu dari kerusakan ekosistem yang ditimbulkan perusahaan dan juga kepada Tuhan atas wujud menghargai betapa bersyukur diberi limpahan kekayaan alam yang mudah untuk didapat.

Kepedulian perusahaan akan lingkungan yang paling dasar yang harus dilaksanakan adalah pengendalian limbah perusahaan agar tidak membutuhkan biaya yang

tinggi. Maka, diperlukan metode *eco-efficiency*. Metode yang dirancang manajemen perusahaan dalam meminimalisasi penggunaan bahan baku, air dan energi untuk tiap unit produksi. Keberhasilan *eco-efficiency* dipengaruhi oleh sistem manajemen lingkungan, strategi bisnis, dan akuntansi manajemen lingkungan (Lai et al., 2018; Passetti & Tenucci, 2016; Yang & Zhang, 2018). Akuntansi manajemen lingkungan mengimplementasikan sistem manajemen kontrol atas biaya lingkungan dan merancang inovasi produk ramah lingkungan sebagai bentuk strategi bisnis untuk menjadikan kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dan keunggulan kompetitif (Burhany & Nurniah, 2018; King, 2017; Knauer & Möslang, 2018; Latan et al., 2018; Pistoni et al., 2018; Qian et al., 2018). Biaya lingkungan yang perlu diperhatikan perusahaan adalah biaya pencegahan, deteksi, kegagalan eksternal, dan internal (Pavlopoulos et al., 2017).

Aja nggugu karepe dhewe juga terdapat dalam kegiatan akuntansi lingkungan. Biaya modal ekonomi sebagai permodalan pada sosial dan lingkungan yang dialokasikan menjadi beban memunculkan anggapan memperkecil profit. Penyebab hal tersebut adalah perusahaan tidak melakukan pelaporan CSR perusahaan karena menyebabkan kerugian pada perusahaan. Pelaporan akuntansi tidak menyediakan akun investasi sosial dan lingkungan sehingga pada pengeluaran biaya untuk penanggulangan kerusakan alam dianggap tambahan biaya secara sosial dan beban lingkungan yang dapat mengurangi laba. Sebenarnya pengeluaran anggaran untuk penanggulangan kerusakan alam merupakan investasi. Kesuksesan perusahaan dalam menangani kerusakan alam tidak dapat dilaporkan karena belum ada akun yang sesuai.

Pembelajaran pada *pitutur luhur aja nggugu karepe dhewe* adalah sikap sesama-mena dengan sesama hanya untuk menyenangkan nafsu dapat berdampak bagi orang lain. Pelaporan akuntansi dapat merugikan perusahaan ataupun *stakeholders* dalam mengambil keputusan. Para akuntan menyarankan agar akuntansi segera direkonstruksi kembali mengikuti perkembangan akan kerusakan alam. Proses praktik akuntansi berkembang lebih memperdulikan lingkungan membuat akuntan menjadi peduli dan ikut melibatkan diri dalam lingkungan secara meluas untuk membe-

rantas kerusakan lingkungan. Penggunaan akuntansi lingkungan untuk memberikan pengukuran yang tepat dan informasi akurat merupakan peran akuntansi dalam gerakan *go green* untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang ramah lingkungan dan pembangunan keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan pada setiap negara dengan cara menjunjung tinggi tujuan akuntansi dalam informasi akuntansi (Chan et al., 2014; Gunarathne & Lee, 2015; Solovida & Latan, 2017).

Penerapan akuntansi lingkungan juga dipengaruhi GCG sesuai dalam teori *stakeholders* dan legitimasi. Teori pada ajaran legitimasi menjelaskan setiap perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan berfungsi untuk dasar komunikasi antara perusahaan kepada masyarakat. Sementara itu, teori *stakeholders* mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan nilai *stakeholders* diperlukan kesinambungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang wajib melaporkan lingkungan adalah perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis bergerak pada segmen sumber daya alam.

Komisaris Independen berperan untuk mempengaruhi kegiatan CSR agar selalu dalam koridor rencana kerja yang dikerjakan tiap tahun oleh perusahaan yang merupakan wewenang dewan komisaris. Frekuensi dewan komisaris dalam menentukan jadwal rapat bertujuan untuk pengawasan terhadap manajemen semakin efektif.

Perusahaan tidak dapat berkonsentrasi hanya pada tujuan perusahaan dari segi maksimalisasi pendapatan. Keberadaan perusahaan tidak murni untuk kepentingan pemegang saham semata. Peran kepentingan masyarakat luar juga penting. Teori *stakeholders* menjelaskan bila perusahaan berkonsentrasi hanya pada kepentingan satu pihak dan keuntungan perusahaan, maka dapat disimpulkan perusahaan dalam keadaan menyimpang.

Pelaksanaan akuntansi lingkungan harus tetap didorong dan diperjuangkan, dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan. Alasan yang perlu diingat perusahaan untuk menjalankan *pitutur luhur aja nggugu karepe dhewe*. Pertama sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan dengan masyarakat sehingga diperlukan perhatian lebih atas keberadaan dan kepentingan lingkungan. Perusahaan perlu paham jika

operasi bisnis mereka merupakan lingkaran yang saling terhubung antara lingkungan masyarakat dengan aktivitas perusahaan. Program pengelompokan penyisihan biaya pelestarian alam dengan akuntansi lingkungan bagian dari pertanggungjawaban pada penggunaan sumber daya alam yang digunakan secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan oleh perusahaan. Kedua, hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat merupakan dasar kedekatan relasi sosial. Dukungan dari masyarakat adalah sumber peningkatan reputasi dan kinerja perusahaan. Maka, lumrah jika perusahaan mendapat tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan keuntungan bagi mereka. Ketiga, kegiatan pelestarian alam menjadikan perusahaan untuk terhindar dari permasalahan sosial. Permasalahan sosial bersumber dari akibat kegiatan perusahaan yang senjang antara sistem dan biaya yang muncul pada masyarakat dengan internal perusahaan.

Metafora rukun agawe santosa, crah agawe bubrah sebagai akuntansi lingkungan dalam nilai kebangsaan. Peran pemerintah pada isu lingkungan adalah menjadi pihak yang berhak dalam membuat aturan untuk kepentingan bersama. Kepemilikan lingkungan hidup merupakan barang bebas yang bersifat tidak ada pesaing dan tidak ada keistimewaan. Tidak ada pesaing adalah jumlah melimpah ruah dijadikan pemanfaatan untuk keperluan bersama sehingga tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak, pemanfaatan yang didapat bernilai sama. *Non-excludability* berarti sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Pelarangan pembatasan manfaat dan penggunaan mengakibatkan ketimpangan hidup manusia (Henri et al., 2016). Barang publik menjadikan kewajiban negara dalam pengaturan untuk rakyat. Negara memiliki tugas menyelesaikan dan menampung tuntutan pemenuhan atas barang publik yang jumlahnya terbatas dalam penyelenggaraan dan tanggung jawab akan akibat eksternalitasnya. Hasil kerja perusahaan dalam penanganan lingkungan dilaporkan pada pelaporan CSR, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur oleh UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Aturan tersebut menyatakan wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjalankan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sukarela bagi perusahaan yang

selain di sektor sumber daya alam. Faktor yang dapat mengubah perusahaan melakukan pengungkapan CSR dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, keuntungan, tata kelola perusahaan, dan komposisi kepemilikan. Perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi lebih dominan melakukan pengungkapan CSR karena tuntutan pemegang saham dan *stakeholder* dalam meningkatkan nilai perusahaan (Conway, 2019; Wicaksono & Kholid, 2019).

Penelitian Conway (2019) dan Stubbs & Higgins (2018) menjelaskan bahwa program CSR dan pelaporan pada pemangku kepentingan masih belum dirasa cukup dalam menjalankan akuntansi lingkungan. Hal ini terjadi karena program yang disuguhkan kepada masyarakat belum memasukkan program pelestarian lingkungan secara menyeluruh. Pelaporan CSR menggunakan jasa asuransi pihak eksternal dan independen yang berperan untuk menambah kepercayaan akan informasi yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan sesuai dengan standar pelaporan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan asuransi masih dirasa kurang cukup karena belum ada standar asuransi yang berhubungan dengan pelaporan CSR. Jasa asuransi yang sekarang digunakan adalah standar asuransi keuangan. Laporan CSR informasi yang disampaikan harus luas dan lebih bersifat kualitatif daripada laporan keuangan.

Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat bukan sepenuhnya tugas dari perusahaan besar melainkan perusahaan kecil perlu melakukan CSR. Pelaporan CSR merupakan kebijakan setiap perusahaan dan Chief Executive Officer (CEO) dan mempengaruhi konsisten perusahaan dalam melakukan pelaporan CSR. Apabila CEO mempunyai pengertian terhadap kepentingan sosial yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi pelaporan CSR dilakukan dengan konsisten dan baik. Hal ini tentu berbanding terbalik apabila CEO kurang memiliki kesadaran mengenai pelaporan CSR maka hanya berfungsi sebagai simbolis dan menaikkan nilai perusahaan pada pemangku kepentingan.

Perusahaan di Indonesia dalam pembuatan program CSR sekadar untuk menjalankan kewajiban secara hukum supaya dapat menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Kontribusi pemerintah dalam

mewujudkan kepedulian pada pelestarian lingkungan masih dianggap lemah. Aturan yang diterbitkan pemerintah mengenai pencemaran lingkungan hidup tidak memiliki aturan yang mengikat pada hukuman pidana, sehingga tidak menunjukkan sikap jera pada pihak yang tidak menerapkan sehingga merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan (Gibassier et al., 2018; Velte & Stawinoga, 2017).

Dalam pelaksanaan CSR terdapat permasalahan mengenai birokrasi, cara, dan kepatuhan. Persoalan birokrasi memiliki kendala dalam *rent seeking*. Kemungkinan ada peran kuat pemerintah dalam melindungi sektor privat yang lalai dalam melakukan kewajiban CSR. CSR justru menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah pusat karena kewajiban dalam penyelesaian pajak oleh perusahaan dan biaya lainnya kepada pemerintah pusat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak menjalankan kewajiban dalam pengelolaan dampak eksternalitas. Pendapat pemerintah daerah dan masyarakat merasa memiliki hak untuk mendapatkan timbal balik dari perusahaan akibat yang timbul dari eksternalitas. Dua pendapat yang berbeda menjadikan timbul konflik kepentingan. Setiap pihak merasa perlu memperjuangkan hak yang dirasa benar dengan pendekatan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kejelasan dan kedudukan aturan mengenai CSR menjadi persoalan tersendiri secara teknis. Pemerintah dalam pembuatan aturan belum memiliki rancangan CSR yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga tugas pemerintah menjadi lebih berlawanan. Selain itu, pemerintah semestinya lebih berperan mengatur diri sebagai penyedia untuk perusahaan-perusahaan dapat melakukan kegiatan-kegiatan CSR-nya lebih maksimal (Amran et al., 2014; Velte & Stawinoga, 2017).

Tidak berjalannya program CSR dapat diartikan sebagai tanda bahwa antara perusahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah kurang memiliki komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kepentingan sendiri. Filosofi *rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* yang mendalami arti harfiah apabila kerukunan memberikan kekuatan sedangkan perpecahan memberikan kerusakan. Makna yang diajarkan adalah sebagai manusia diperlukan hidup rukun dalam sehingga komunikasi antarmasyarakat dapat terhubung. Filosofi *rukun agawe*

santosa, crah agawe bubrah merupakan ajaran kebiasaan hidup orang Jawa yang terbiasa hidup rukun dan damai. Sikap rukun menunjukkan apabila lingkungan masyarakat mempunyai tujuan sikap dan pendapat yang sama sehingga menimbulkan kehidupan ayem tentrem. Kehidupan masyarakat yang damai sejahtera, gotong royong berjalan dengan baik, maka dijauhkan dari situasi permusuhan dan pertengkaran berkepanjangan.

Rukun *agawe santosa, crah agawe bubrah* terlahir dari keinginan hidup orang Jawa yang berharap selalu dalam keadaan damai sejahtera, aman tenteram, dan bahagia karena pada dasarnya orang Jawa tidak suka memiliki konflik antarsesama. Konflik bagi orang Jawa merupakan hal yang tidak berguna dan merusak hubungan antarsesama. Permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara bersama-sama menggunakan musyawarah dengan tata cara yang baik. Orang Jawa mengakui apabila rusak dan tenteram kehidupan seseorang didasari dari lingkungan terdalam yaitu lingkungan yang paling dekat dengan kita (Sumodiningrat & Wulandari, 2014; Tartono, 2009).

Rukun *agawe santosa, crah agawe bubrah* berasaskan *pitutur luhur* yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan merupakan bentuk sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pandangan ideologi nasional menjelaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan menjadi sebuah perjanjian dalam membangun kepedulian antarmasyarakat dan gotong royong. Ideologi yang menerapkan nilai-nilai kebangsaan merupakan tata cara bertindak dalam bermasyarakat dan untuk mencapai kepentingan dalam suatu negara. Nilai-nilai kebangsaan merupakan awal mula kebiasaan dan budaya keseharian dalam aktivitas sosial, berbangsa, dan bernegara sampai umumnya merupakan asas pembuatan ideologi nasional, dasar negara, dan jati diri bangsa. Nilai-nilai kebangsaan menjadikan landasan atas semua tindakan dalam pengelolaan pemerintahan negara dan etika bagi penyelenggara negara. Nilai-nilai kebangsaan didasari atas aturan bagaimana memandang permasalahan hidup negara. Nilai-nilai kebangsaan merupakan representasi pada kenyataan aktivitas bangsa yang selalu memiliki keaneragaman masyarakat untuk mewujudkan kesepakatan dalam membangun kebersamaan. Nilai-nilai ke-

bangsaan terletak pada sikap dan perilaku yang bertujuan untuk negara (Sumodinigrat & Wulandari, 2014; Yaqin, 2013).

Nilai-nilai kebangsaan yang dijabarkan tersebut menandai makna bahwa sebuah negara tidak akan berhasil dan maju apabila tidak ada landasan dan tindakan yang mewujudkan kesepakatan atau rukun dalam membangun sebuah negara. Jalannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilandasi etika dan kondisi di lapangan dalam membuat aturan. Sebaliknya, bagi masyarakat umum atau perusahaan dengan kesadaran diri mematuhi perintah yang berlaku di suatu negara. Keberhasilan suatu negara merupakan cerminan jati diri bangsa dalam berperilaku dan beretika (Dillard & Brown, 2015; Hazelton, 2014; Orlitzky, 2015).

Apabila ingin terjalin kerukunan antara perusahaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggalakkan program peduli lingkungan, maka di antara mereka perlu ada persatuan dan kesatuan dalam menjalankan aturan mengenai kepedulian lingkungan. Sebaliknya, apabila perusahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah *crah agawe bubrah* dan tidak memiliki titik temu dalam menerapkan dan membuat aturan mengenai tanggung jawab perusahaan, maka jangan berharap program yang sudah dirancang dengan baik oleh perusahaan dan aturan yang sangat ketat dapat berjalan dengan baik. Program CSR memiliki masalah tidak hanya dalam pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat memiliki permasalahan. Kemenkum dan HAM menginginkan program CSR diberlakukan secara wajib bagi seluruh perusahaan. Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang Kementerian Perindustrian tidak memiliki aturan wajib mengenai program CSR.

Hukum lingkungan memiliki dua pendekatan dalam penanganan kerusakan lingkungan secara biaya dan perilaku (Amaran et al., 2014). Perencanaan biaya digunakan untuk mengatur prosedur pasar dan perilaku berdasarkan pembuatan aturan serta pencegahan. Pemerintah turut serta mengenai kepedulian kualitas lingkungan hidup dengan cara mendorong kebiasaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup seperti pemberian pajak berguna untuk pembiayaan jasa lingkungan hidup. Kedua, pengawasan aktivitas yang dapat merusak lingkungan dengan pemberian pajak pada perusahaan yang memberikan

dampak eksternalitas negatif (Awalin, 2017; Yuniarti, 2009). Di Indonesia perlakuan pajak untuk lingkungan hidup diterapkan di Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2017. Perlakuan pajak yang diterapkan digunakan untuk pendanaan pemulihan, penanggulangan, dan konservasi. Pajak yang dikelola oleh pihak pemerintah pusat ataupun daerah.

Peraturan daerah terkadang kurang memberi perhatian kepada pihak yang menjadi objek yang diberi pertanggungjawaban. Pemerintah daerah seharusnya memiliki pemahaman struktur berpikir perusahaan. Selain itu, pemerintah daerah lebih baik melihat kondisi di lapangan mengenai kemampuan anggaran perusahaan.

Kesimpulan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah semua perlu bekerja sama untuk menjalankan regulasi sesuai koridor untuk mewujudkan program CSR yang tepat. Kekompakan pihak entitas, regulator, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk membuat regulasi yang baik merupakan representasi keberhasilan program CSR. Tugas perusahaan ialah membuat program CSR yang diperlukan masyarakat bukan untuk menjadikan sarana unjuk gigi promosi perusahaan. Transparansi program CSR dan melayani masyarakat untuk mendulang keikutsertaan masyarakat diperlukan demi terwujudnya CSR jauh dari sifat eksklusif sehingga tidak perlu melibatkan keikutsertaan masyarakat.

Hasil penelitian ini melengkapi penelitian Pangesti (2017) mengenai *pitutur luhur* dalam mengajarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian disisipkan dalam kegiatan sosial perusahaan sebagai bagian konsep CSR. Hasil selaras terjadi pada penggunaan akuntansi lingkungan yang awal mula terwujud dari keresahan dalam eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Memetaforakan makna *ibu bumi, bapak aksa* menunjukkan bahwa fungsi akuntansi lingkungan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam. Selain itu, penelitian Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa *pitutur luhur* dapat mengonvergensi akuntansi pendidikan sehingga menumbuhkan inovatif dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan respon perkembangan lingkungan, maka dalam penulisan ini lebih mendalam memetaforakan *aja nggugu karepe dhewe* pada diri perusahaan akan berdampak buruk apabila tidak memperhatikan sekitar lingkungan untuk mendapatkan respon

setimpal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Suatu rancangan tidak akan dapat berjalan lancar apabila tidak ada kesinambungan antara pemimpin dan pelaksana seperti penerapan akuntansi lingkungan. Ketidakselarasan antara kepentingan perusahaan dan pemerintah membuat *rukun agawe santosa*, *crach agawe bubrah* akan merugikan berbagai pihak sehingga bukan kebaikan yang akan diraih melainkan keburukan yang diraih. Penelitian ini menjelaskan dampak dari ketidakselarasan antara pemerintah, karyawan, dan masyarakat sekitar. Aspek pengembangan masyarakat seharusnya diimplementasikan dengan tekad dan kepedulian yang tinggi dari semua pihak yang terkait. Hasil penelitian ini juga selaras dengan Reraja (2019) bahwa *pitutur luhur* menjadi pedoman untuk profesionalitas etos kerja jika digunakan untuk hal-hal yang baik. Pada akuntan sikap ini masih sangat familiar dan kental terasa.

SIMPULAN

Akuntansi konvensional memiliki tujuan untuk memberi pertanggungjawaban informasi aktivitas kepada seluruh pemangku kepentingan yang pada umumnya menjadikan laba dan tingkat kredibilitas perusahaan sebagai tujuan. Kritik atas akuntansi konvensional tidak dapat menjadikan pedoman penanggungjawab perusahaan pada lingkungan menjadikan penelitian utama dengan topik akuntansi lingkungan. Peran pemimpin puncak menjadi penghubung eksternal antara pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat merupakan bukti konsistensi dalam program keberlanjutan. *Pitutur luhur* dapat dijadikan pedoman ajaran secara nilai dan sikap etis perusahaan baik pada program keberlanjutan maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Pitutur luhur* dianggap mampu menjawab fenomena mengenai perusahaan yang melakukan program keberlanjutan ataupun tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi masih tersandung masalah pencemaran lingkungan. *Pitutur luhur* menjawab fenomena tersebut dari sisi sikap etis dan nilai-nilai norma yang harus diterapkan pada manajemen internal perusahaan.

Akuntansi lingkungan terwujud dari keresahan dalam eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ajaran *pitutur luhur ibu bumi*, *bapak aksa* telah menjelaskan bahwa keseimbangan ekosistem itu penting apabila bumi tergerus oleh ketamakan

manusia dan langit akan murka dengan menunjukkan kemarahannya dalam bentuk bencana alam. Penggunaan akuntansi lingkungan diharapkan sebagai penyeimbang antara perusahaan yang masih sangat membutuhkan kekayaan alam sebagai bahan utama aktivitas bisnis tetapi tidak membahayakan dan merugikan aktivitas masyarakat sekitar yang juga memiliki hak atas kekayaan alam. Perusahaan sudah harus memulai pemikiran baru bahwa tujuan perusahaan tidak sepenuhnya mengenai laba. Jadi perusahaan *aja nggugu karepe dhewe* (berberhah diri menciptakan akuntansi lingkungan untuk memperhitungkan biaya perbaikan alam). Perusahaan juga diharapkan semakin kreatif dalam mengatur aktivitas bisnis untuk menciptakan *eco-effisiensi* karena akuntansi lingkungan tidak hanya berbicara mengenai biaya penanggulangan melainkan juga biaya pencegahan. Penerapan akuntansi lingkungan masih dirasa kurang di perusahaan. Ketidakselarasan antara kepentingan perusahaan dan pemerintah membuat *rukun agawe santosa*, *crach agawe bubrah*. Kunci utama keberhasilan akuntansi lingkungan yaitu memperkuat hubungan dan kerja sama dengan pemerintah, karyawan, dan masyarakat sekitar. Aspek pengembangan masyarakat seharusnya diimplementasikan dengan tekad dan kepedulian yang tinggi dari semua pihak yang terkait.

Keterbatasan penelitian ini adalah sumber penelitian menggunakan literatur pustaka yang akan menimbulkan keterbatasan dalam penjabaran historis dan makna pada kehidupan sehari-hari setiap *pitutur luhur* yang dikaitkan dengan akuntansi lingkungan. Literatur pustaka yang digunakan hanya sebatas menjelaskan *pitutur luhur* secara umum tidak menjurus secara langsung pada kehidupan alam. Hal tersebut membuat arti secara harfiah dan nilai-nilai yang terkandung pada *pitutur luhur* penulis kembangkan dengan terbatas. Saran untuk penelitian berikutnya adalah perlu dilakukan wawancara secara mendalam pada orang yang memiliki ilmu yang memahami historis *pitutur luhur*.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmadi, A., & Bouri, A. (2017). The Relationship between Financial Attributes, Environmental Performance and Environmental Disclosure: Empirical Investigation on French Firms Listed on

- CAC 40. *Management of Environmental Quality*, 28(4), 490-506. <https://doi.org/10.1108/MEQ-07-2015-0132>
- Amran, A., Lee, S. P., & Devi, S. S. (2014). The Influence of Governance Structure and Strategic Corporate Social Responsibility toward Sustainability Reporting Quality. *Business Strategy and the Environment*, 23(4), 217-235. <https://doi.org/10.1002/bse.1767>
- Awalin, F. R. N. (2017). Dunia Batin Jawa: Aksara Jawa sebagai Filosofi dalam Memahami Konsep Ketuhanan. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(2), 289-309. <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.289-309>
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 159-168. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.6338>
- Beattie, V. (2014). Accounting Narratives and the Narrative Turn in Accounting Research: Issues, Theory, Methodology, Methods and a Research Framework. *The British Accounting Review*, 46(2), 111-134. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.05.001>
- Bernardi, C., & Stark, A. W. (2018). Environmental, Social and Governance Disclosure, Integrated Reporting, and the Accuracy of Analyst Forecasts. *British Accounting Review*, 50(1), 16-31. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.10.001>
- Böhringer, C., Rivers, N., & Yonezawa, H. (2016). Vertical Fiscal Externalities and the Environment. *Journal of Environmental Economics and Management*, 77, 51-74. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2016.01.002>
- Burhany, D. I., & Nurniah, N. (2018). Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(3), 279-298. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.262>
- Burritt, R., & Schaltegger, S. (2014). Accounting towards Sustainability in Production and Supply Chains. *British Accounting Review*, 46(4), 327-343. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.001>
- Chan, H. K., Wang, X., & Raffoni, A. (2014). An Integrated Approach for Green Design: Life-Cycle, Fuzzy AHP and Environmental Management Accounting. *British Accounting Review*, 46(4), 344-360. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.004>
- Chandok, R. I. S., & Singh, S. (2017). Empirical Study on Determinants of Environmental Disclosure: Approach of Selected Conglomerates. *Managerial Auditing Journal*, 32(4/5), 332-355. <https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2016-1344>
- Conway, E. (2019). Quantitative Impacts of Mandatory Integrated Reporting. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(4), 604-634. <https://doi.org/10.1108/JFRA-08-2018-0066>
- Coulson, A. B., Adams, C. A., Nugent, M. N., & Haynes, K. (2015). Exploring Metaphors of Capitals and the Framing of Multiple Capitals: Challenges and Opportunities for <IR>. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(3), 290-314. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-05-2015-0032>
- D'Amico, E., Coluccia, D., Fontana, S., & Solimene, S. (2016). Factors Influencing Corporate Environmental Disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 25(3), 178-192. <https://doi.org/10.1002/bse.1865>
- Deegan, C. (2017). Twenty Five Years of Social and Environmental Accounting Research within Critical Perspectives of Accounting: Hits, Misses and Ways Forward. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 65-87. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.005>
- Dillard, J., & Brown, J. (2015). Broadening Out and Opening Up: An Agonistic Attitude toward Progressive Social Accounting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 243-266. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2014-0055>
- Eltivia, N. (2013). Menguak "Pancer" Integritas Akuntan dengan Filosofi Jawa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 174-181. <https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6695>
- Firdausy, S. W. E. (2017). Hakikat Tuhan: Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 97-112. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.684>
- Gibassier, D., Rodrigue, M., & Arjaliès, D. (2018). "Integrated Reporting is like God: No One has Met Him, but Every-

- body Talks about Him”: The Power of Myths in the Adoption of Management Innovations. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(5), 1349-1380. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2016-2631>
- Gunarathne, N., & Lee, K. (2015). Environmental Management Accounting (EMA) for Environmental Management and Organizational Change: An Eco-Control Approach. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 11(3), 362-383. <https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2013-0078>
- Hashemi, S. H., Karimi, A., & Tavana, M. (2015). An Integrated Green Supplier Selection Approach with Analytic Network Process and Improved Grey Relational Analysis. *International Journal of Production Economics*, 159, 178-191. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.027>
- Hazelton, J. (2014). Corporate Water Accountability – The Role of Water Labels Given Non-Fungible Extractions. *Pacific Accounting Review*, 26(1/2), 8-27. <https://doi.org/10.1108/PAR-07-2013-0074>
- Henri, J. F., Boiral, O., & Roy, M. J. (2016). Strategic Cost Management and Performance: The Case of Environmental Costs. *The British Accounting Review*, 48(2), 269-282. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2015.01.001>
- Hummel, P., & Hörisch, J. (2020). The Hidden Power of Language: How “Value Creation Accounting” Influences Decisions on Expenditures, Cost Reductions and Staff Costs. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(1), 187-206. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2018-0111>
- Kamayanti, A., & Ahmar, N. (2019). Tracing Accounting in Javanese Tradition. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(1), 17-26. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.4.003>
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2018). Determinants of Forward-Looking Disclosures in Integrated Reporting. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 115-144. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2016-1498>
- Knauer, T., & Möslang, K. (2018). The Adoption and Benefits of Life Cycle Costing. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 14(2), 188-215. <https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2016-0027>
- Kusdewanti, A. I., Setiawan, A. R., Kamayanti, A., & Mulawarman, A. D. (2014). Akuntansi Bantengan: Perlawanan Akuntansi Indonesia melalui Metafora Bantengan dan Topeng Malang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 149-169. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5013>
- Lai, A., Melloni, G., & Stacchezzini, R. (2018). Integrated Reporting and Narrative Accountability: The Role of Preparers. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(5), 1381-1405. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2016-2674>
- Latan, H., Jabbour, C. J. C., Jabbour, A. B. L. D. S., Wamba, S. F., & Shahbaz, M. (2018). Effects of Environmental Strategy, Environmental Uncertainty, and Top Management’s Commitment on Corporate Environmental Performance: The Role of Environmental Management Accounting. *Journal of Cleaner Production*, 180, 297-306. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.106>
- Lynott, D., & Coventry, K. (2014). On the Ups and Downs of Emotion: Testing between Conceptual-Metaphor and Polarity Accounts of Emotional Valence-Spatial Location Interactions. *Psychonomic Bulletin and Review*, 21(1), 218-226. <https://doi.org/10.3758/s13423-013-0481-5>
- Mans-Kemp, N., & Lugt, C. T. V. D. (2020). Linking Integrated Reporting quality with Sustainability Performance and Financial Performance in South Africa. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 23(1), 1-11. <https://doi.org/10.4102/sajems.v23i1.3572>
- Marriott, P., & McGuigan, N. (2018). Visual Metaphor and Visual Tools in Accounting Education. *Accounting Education*, 27(6), 549-551. <https://doi.org/10.1080/09639284.2018.1541520>
- Massaro, M., Dumay, J., Garlatti, A., & Dal Mas, F. (2018). Practitioners’ Views on Intellectual capital and Sustainability: From a Performance-Based to a Worth-Based Perspective. *Journal of Intellectual Capital*, 19(2), 367-386. <https://doi.org/10.1108/JIC-02-2017-0033>

- Mata, C., Fialho, A., & Eugénio, T. (2018). A Decade of Environmental Accounting Reporting: What We Know? *Journal of Cleaner Production*, 198, 1198–1209. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.087>
- Musman, A. (2017). *Pitutur Luhur Jawa (Ajaran Hidup dalam Serat Jawa)*. Penerbit Anak Hebat Indonesia.
- Nor, N. M., Bahari, N. A. S., Adnan, N. A., Kamil, S. M. Q. A. S., & Ali, I. M. (2016). The Effects of Environmental Disclosure on Financial Performance in Malaysia. *Procedia - Economics and Finance*, 35, 117–126. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00016-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00016-2)
- Orlitzky, M. (2015). The Politics of Corporate Social Responsibility or: Why Milton Friedman Has Been Right All Along. *Annals in Social Responsibility*, 1(1), 5-29. <https://doi.org/10.1108/ASR-06-2015-0004>
- Pangesti, R. D. (2017). Corporate Social Responsibility dalam Pemikiran Budaya Jawa Berdimensi “Hamemayu Hayuning Bawana” (Pendekatan Studi Hermeneutika). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2(2), 224–238. <https://doi.org/10.31093/jraba.v2i2.42>
- Passetti, E., & Tenucci, A. (2016). Eco-Efficiency Measurement and the Influence of Organisational Factors: Evidence from Large Italian Companies. *Journal of Cleaner Production*, 122, 228–239. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.035>
- Pavlopoulos, A., Magnis, C., & Iatridis, G. E. (2017). Integrated Reporting: Is It the Last Piece of the Accounting Disclosure Puzzle? *Journal of Multinational Financial Management*, 41, 23-46. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.001>
- Pistoni, A., Songini, L., & Bavagnoli, F. (2018). Integrated Reporting Quality: An Empirical Analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(4), 489-507. <https://doi.org/10.1002/csr.1474>
- Prasetyo, W. (2019). Akuntansi 4.0: Belajar Transdisipliner Momong, Among, Ngemong. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 217–228. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i3.217>
- Qian, W., Hörisch, J., & Schaltegger, S. (2018). Environmental Management Accounting and Its Effects on Carbon Management and Disclosure Quality. *Journal of Cleaner Production*, 174, 1608–1619. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.092>
- Reraja, F. M. (2019). Karakter Akuntan dalam Filosofi Adigang, Adigung, Adiguna. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 482–501. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.28>
- Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social Responsibility and Financial Performance: The Role of Good Corporate Governance. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(2), 137-151. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.08.001>
- Rutherford, B. A. (2020). Ironies of Narrative Accounting Research and the Case for Professional Accounting Judgment in Accounting Scholarship. *Meditari Accountancy Research*, 28(2), 229-250. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2019-0512>
- Salim, A. (2013). Javanese Religion, Islam or Syncretism: Comparing Woodward’s Islam in Java and Betty’s Varieties of Javanese Religion. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 223-266. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.223-266>
- Senn, J., & Giordano-Spring, S. (2020). The Limits of Environmental Accounting Disclosure: Enforcement of Regulations, Standards, and Interpretative Strategies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(6), 1367-1393. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2018-3461>
- Siskawati, E., & Susilawati, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Sarira. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 470-486. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7067>
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. The Modern Library.
- Solovida, G. T., & Latan, H. (2017). Linking Environmental Strategy to Environmental Performance: Mediation Role of Environmental Management Accounting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 8(5), 595-619. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2016-0046>
- Sopacua, I. O. (2017). Antecedents of CSR Disclosure in Manufacturing Companies in Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 95-106. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.1168>

- Stubbs, W., & Higgins, C. (2018). Stakeholders' Perspectives on the Role of Regulatory Reform in Integrated Reporting. *Journal of Business Ethics*, 147(3), 489-508. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2954-0>
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2014). *Pitutor Luhur Budaya Jawa*. Penerbit Narasi.
- Susilo, S., & Syato, I. (2016). Common Identity Framework of Cultural Knowledge and Practices of Javanese Islam. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 161-184. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.161-184>
- Tartono, S. S. (2009). *Pitutor Adi Luhur: Ajaran Moral dan Filosofi Hidup Orang Jawa*. Yayasan Pustaka Nusantara
- Velte, P., & Stawinoga, M. (2017). Integrated Reporting: The Current State of Empirical Research, Limitations and Future Research Implications. *Journal of Management Control*, 28(3), 275-320. <https://doi.org/10.1007/s00187-016-0235-4>
- Wicaksono, A. P., & Kholid, M. N. (2019). Tujuan Tersembunyi Penggunaan Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 63-81. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10004>
- Widodo, S. T., & Saddhono, K. (2012). Petangan Tradition in Javanese Personal Naming Practice: An Ethnolinguistic Study. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 12(4), 1165-1177.
- Winkler, P., Etter, M., & Castelló, I. (2020). Vicious and Virtuous Circles of Aspirational Talk: From Self-Persuasive to Agonistic CSR Rhetoric. *Business & Society*. 59(1), 98-128. <https://doi.org/10.1177/0007650319825758>
- Yang, L., & Zhang, X. (2018). Assessing Regional Eco-Efficiency from the Perspective of Resource, Environmental and Economic Performance in China: A Bootstrapping Approach in Global Data Envelopment Analysis. *Journal of Cleaner Production*, 173, 100-111. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.166>
- Yaqin, A. (2013). Pitutor Luhur sebagai Teks Kaligrafi Jawa dalam Karya Ukir Kayu. *Arty: Journal of Visual Arts*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.15294/arti.v2i1.2426>
- Zakub, R., Widodo, S. T., & Setiawan, B. (2018). The Relevance between Javanese Pitutor Luhur and Islam Religiosity. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 16(1), 148-164. <https://doi.org/10.24090/ibda.v16i1.1659>
- Zanten, W. V. (2012). Social Qualities of Time and Space Created in Performing Arts of West Java: The Implications for Safeguarding Living Culture. *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 14(1), 121-144. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v14i1.52>
- Zhang, L., Wu, J., & Liu, H. (2018). Turning Green into Gold: A Review on the Economics of Green Buildings. *Journal of Cleaner Production*, 172, 2234-2245. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.188>
- Zhang, Z., & Zhang, Z. (2017). Intermediate Input Linkage and Carbon Leakage. *Environment and Development Economics*, 22(6), 725-746. <https://doi.org/10.1017/S1355770X17000250>